

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sebagai negara agraris, Indonesia salah satu negara yang berkembang dengan pertanian sebagai sumber mata pencaharian penduduknya, dengan demikian negara Indonesia masih mempercayakan atau mengandalkan sektor pertanian untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut didukung dengan wilayah Indonesia yang berada pada wilayah tropis, sehingga menjadikan potensi pertanian dapat berkembang dengan baik. Selain beriklim tropis, kondisi tanah Indonesia sangat terkenal dengan kesuburannya. Berbagai jenis tanaman dapat berkembang dengan baik di Indonesia (Simanjuntak, 2018).

Sebagian besar penduduk di Indonesia yang tinggal di daerah pedesaan dengan sumber pendapatan utama berasal pertanian. Indonesia menjadi incaran pada abad akhir XVI sampai abad XVII dari bangsa Portugis, Belanda Inggris dan Negara Eropa Barat lainnya untuk mendapatkan rempah-rempah dengan kualitas tinggi kemudian dipasarkan di pasar Eropa Barat seperti Perancis, Spanyol, Swiss, dan Belanda. Pada masa tersebut sebagian besar investasi yang ditanamkan ke Dutch Indie atau Indonesia US\$ 1,6 miliar, 54% diantaranya di bidang pertanian (Munandar, 2014). Pertanian pada saat itu mengalami masa kejayaan namun seiring berkembangnya zaman pertanian mulai tergeser dengan bidang industri.

Hal ini dibawa oleh besarnya peranan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) khususnya pada masa krisis ekonomi yang dialami Indonesia, satu-satunya sektor yang menjadi penyelamat perekonomian Indonesia pada tahun 1997-1998 hanyalah sektor pertanian, dimana pertanian memiliki pertumbuhan yang positif sehingga dapat menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa sektor pertanian harus mendapatkan perhatian pemerintah karena memiliki dasar yang kuat sebagai fondasi perekonomian nasional (Kusumaningrum, 2019).

Sektor pertanian berfungsi sebagai fondasi utama pembangunan karena sejumlah alasan, Menurut Raharjo (1994), ada beberapa alasan mengapa

sektor pertanian perlu terus dikembangkan. Pertama, karena barang-barang industri memerlukan dukungan daya beli masyarakat, karena sebagian besar calon pembelinya adalah petani yang merupakan mayoritas penduduk; Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu diperoleh melalui pembangunan pertanian. Kedua, untuk menekan biaya produksi dari komponen upah dan gaji, diperlukan ketersediaan bahan pangan yang murah, sehingga upah dan gaji yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan karyawan. Hal ini dapat dicapai jika produksi produk pertanian khususnya pangan dapat ditingkatkan sehingga harga dapat lebih murah dan terjangkau oleh daya beli pekerja dan karyawan. Ketiga, industri juga memerlukan bahan baku yang berasal dari sektor pertanian sehingga produksi bahan industri tersebut menjadi landasan bagi tumbuhnya industri itu sendiri (Nuryasin, 2006).

Sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peranan tersebut antara lain: meningkatkan penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, menyediakan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Kusumaningrum, 2019). Islam mewajibkan manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan (*Al-Hayyat Al-Thayyibah*), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَسْلَمُوا لَكُمْ وَاتَّخَذُوا الْأَرْضَ طَمَعًا وَاسْتَعْمَرُوا فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾

Artinya: “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". (QS.Hud 11: 61)

Ayat ini mengandung dua makna yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Pertama, *Al-wujub* atau kewajiban manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan. Kedua, ayat tersebut mengandung perintah Allah kepada umat manusia untuk membangun jagad raya. Perintah Allah tersebut wajib dan mutlak dan kata *al-imarah*/memakmurkan identik dengan kata *An-tanmiyah iqtisadiyah*/pembangunan ekonomi (Ichan, 2023).

Bercocok tanam bertujuan untuk mengelola lahan pertanian dengan baik. Bercocok tanam memberikan manfaat yang umum bagi kaum muslim bahkan bagi para hewan. Hal seumpama ini selaras dengan riwayat Rafi' bin Khadij bahwa di zaman Rasulullah telah diingatkan oleh beberapa orang bapa-bapa saudara Baginda yaitu Rasulullah melarang daripada perkara yang memberi manfaat kepada kami, lalu kami bertanya: “Apakah perkara tersebut?”. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barang siapa yang mempunyai tanah hendaklah dia mengerjakan dengan Bertani atau (jika dia tidak berupaya melakukannya) hendaklah menyerahkannya kepada saudaranya supaya diusahakan dan janganlah dia menyewakan (sekalipun) hanya sepertiga, seperempat dan makanan asasi.” (Hadis riwayat Abu Daud).

Pada hakikatnya Islam sangat menggalakkan sektor pertanian jelas daripada peruntukkan yang ada di dalam syariah. Sebagai contoh, barang siapa yang menggarap tanah yang terbengkalai akan mendapatkan hak milik kekal terhadap tanah tersebut berdasarkan pendapat ulama. Peruntukkan ini jelas memberi intensif kepada pengusaha-pengusaha bidang pertanian yang menggarap tanah terbengkalai atau mati (Darmalaksana, 2023).

Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang mempunyai sumber daya alam yang besar dan cukup lengkap. Dilihat secara topografis, provinsi ini mempunyai potensi pengembangan dalam beberapa aspek perekonomian. Secara garis besar Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu bagian utara terdiri dari daerah dataran rendah, bagian tengah terdiri dari daerah dataran tinggi pegunungan, dan bagian selatan terdiri dari daerah perbukitan dengan sedikit pantai. Hal tersebut menguntungkan tentunya serta membawa keuntungan tersendiri bagi tenaga kerja sektor pertanian apabila dapat mengelola lahan pertanian dengan maksimal.

**Tabel 1. 1 Kepadatan Penduduk Beberapa Provinsi di Indonesia**

Provinsi	Jiwa/km <sup>2</sup>				
	2015	2016	2019	2020	2021
DKI. Jakarta	15.328	15.478	15.900	15.907	15.978
Jawa Barat	1.320	1.339	1.394	1.365	1.379
Jawa Tengah	1.030	1.037	1.058	1.113	1.120
DI Yogyakarta	1.174	1.188	1.227	1.171	1.185
Jawa Timur	813	817	831	851	855
Banten	1.237	1.263	1.338	1.232	1.248
Bali	718	727	750	747	755
NTB	260	264	273	286	290
NTT	150	107	112	109	111

*Sumber Data: Badan Pusat Statistik*

Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki kepadatan penduduk terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Kondisi ini terjadi karena Pulau Jawa merupakan salah satu pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1. Jumlah penduduk yang melimpah menyebabkan suatu hal klasik pada negara-negara berkembang, khususnya Indonesia.

**Tabel 1. 2 Tenaga kerja informal pertanian Provinsi Jawa Barat**

Tahun	Tenaga Kerja Sektor Pertanian
2018	3.250.825
2019	2.901.981
2020	3.256.609
2021	3.124.085
2022	3.157.231

*Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa barat*

Pada tahun 2018 tenaga kerja informal sektor pertanian mencapai 86,19% yang dimana artinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2019, tenaga kerja informal mencapai 88,94% berarti daerah Jawa Barat memiliki partisipasi yang cukup tinggi dalam sektor pertanian dan pada tahun 2021 sebesar 89,19%, hal tersebut membuktikan bahwa dalam kurun

waktu empat tahun pertumbuhan di Jawa Barat memiliki pertumbuhan yang positif serta terjadi fluktuasi yang wajar.

Berdasarkan data BPS (2022), menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Jawa Barat mengalami kenaikan yaitu sekitar 6,82 ribu jiwa, dari 4,19 juta jiwa (8,43 persen) pada September 2020 menjadi 4, 20 juta jiwa (8,40 persen) pada Maret 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian khusus terhadap masyarakat tani karena berkaitan erat dengan masa depan usaha tani padi dalam kelangsungan produksi padi sebagai makanan pokok (bps.go.id, n.d.).

Hasil produksi pada sektor pertanian bermanfaat sebagai input bagi sektor ekonomi lainnya, khususnya sektor modern. Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian Jawa Barat yang dibuktikan dengan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDRB) dan kemampuannya dalam mendorong perluasan sektor ekonomi lainnya. PDRB menunjukkan berapa besar output yang dihasilkan, dan biasanya dinyatakan dalam rupiah berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Tingginya PDRB suatu daerah dapat mengidentikkan besarnya pendapatan pada wilayah tersebut, namun belum tentu terjadi pemerataan pada pendapatan masyarakatnya (Emmalian, 2018).

**Tabel 1. 3 PDRB Sektor Pertanian Jawa Barat**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB Sektor Pertanian</b>
2018	101 752,20
2019	104 596,75
2020	107 000,79
2021	108 406,55
2022	113 186,36

*Sumber Data: Badan Pusat Statistika Jawa Barat*

Pada kurun waktu lima tahun terakhir, tahun 2018-2022 PDRB sektor pertanian Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan terus-menerus pada setiap tahunnya yang berarti bahwa sektor pertanian mengalami pertumbuhan pada tahun tersebut sehingga bisa berkontribusi lebih banyak pada produk domestik regional bruto.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima (It) dan dibayar (Ib) petani, karena ukuran kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani (Sutrisma, 2021). Nilai tukar petani pangan merupakan indikator kesejahteraan petani, semakin tinggi NTP relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Pedesaan yang merupakan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani hidup di lingkaran kemiskinan.

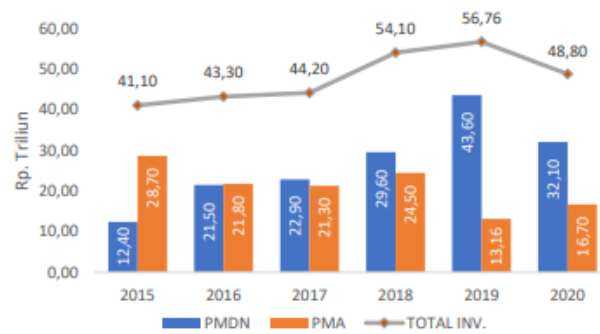
**Tabel 1. 4 Nilai Tukar Petani**

<b>Tahun</b>	<b>NTP (Nilai Tukar Petani)</b>
2018	103,16
2019	101,33
2020	101,41
2021	97,84
2022	100,22

*Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat*

Dari Tabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pada tahun 2018 – 2022 terjadi fluktuasi yang cukup stabil dan wajar. Tahun 2018 terjadi kenaikan yang cukup tinggi sebesar 0,10% dari tahun – tahun sebelumnya. Dari NTP dapat terlihat tingkat daya saing produk pertanian yang dihasilkan petani dibandingkan dengan produk lain, sehingga arah perkembangan kebijakan pada spesialisasi Produk unggulan wilayah yang berkualitas dapat dilakukan (Rafi Irwanto, 2023).

Investasi diartikan sebagai suatu usaha untuk menaruh dana dalam bentuk perekonomian karena dana yang telah diberikan dapat digunakan untuk pengembangan, inovasi, ataupun pembelian mesin untuk menambah produksi (Siswati Rachman, 2016).



*Sumber Data: Kementerian Pertanian*

**Gambar 1. 1**

### **Realisasi Nilai Proyek PMDN dan PMA sektor pertanian**

Dapat dilihat dari diagram diatas bahwa investasi pada sektor pertanian mengalami kemajuan dengan bertambahnya angka investasi dari tahun ke tahun. selama periode 2015-2020, terjadi peningkatan investasi yang cukup signifikan pada sektor pertanian yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini terlihat dari jumlah investasi PMDN yang pada tahun 2015 sebesar Rp 12,4 triliun, meningkat menjadi Rp 29,6 triliun pada tahun 2018 dan kembali meningkat menjadi Rp 43,6 triliun di tahun 2019, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi Rp . 32,1 triliun.

Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor pertanian, nilai investasi pada tahun 2015 mencapai Rp 28,7 triliun, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp 16,7 triliun. Realisasi investasi sektor pertanian baik PMDN maupun PMA, lebih terfokus pada sub sektor Perkebunan, dibandingkan dengan sub sektor tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Pada periode 2015–2020, realisasi investasi PMDN dan PMA pada sub sektor Perkebunan kontribusinya mencapai 95,51%, sedangkan sub sektor Tanaman Pangan 0,26%, Hortikultura 0,16% dan Ternak 4,02%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Investasi sektor ekonomi mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat meskipun masih jauh tertinggal dari sektor industri.

Sektor pertanian bisa dijadikan batu loncatan pembangunan di pedesaan dan mempercepat laju perekonomian yang saat ini bergerak lambat. Untuk mencapai potensinya dan terintegrasi dengan perekonomian pedesaan, sangat diperlukan investasi sarana dan prasarana untuk merangsang pertumbuhan ekonomi pedesaan baik dari pihak swasta, pemerintah, atau kolektif komunitas masyarakat. Bidang penelitian, pelatihan, dan penyuluhan pertanian masih tertinggal atau bahkan tidak terlihat, kecuali transfer teknologi di bidang industri yang saat ini sedang terjadi dan menggeser sektor pertanian secara perlahan-lahan.

Kabinet Indonesia bersatu telah menetapkan program pembangunannya dengan menggunakan strategi tiga jalur (*triple track strategy*) yang berbasas (*Growth, pro-job* dan *pro-poor*). Operasionalisasi konsep strategi tiga jalur tersebut dirancang melalui: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 6.5 % per tahun melalui percepatan investasi dan ekspor; (2) membenahan sektor riil untuk mampu menyerap tambahan angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru, dan (3) revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan (Kolondam, Posumah, & Kayoga, 2021).

**Tabel 1. 5 Proyeksi Jumlah penduduk di Indonesia**

Pulau	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Sumatera	50.860,3	55.272,9	59.337,1	62.898,6	65.938,3	68.500,0
Jawa	137.033,3	145.143,6	152.449,9	158.738,0	163.754,8	167.325,5
Bali dan Kep. Nusantara	13.129,7	14.108,5	15.047,8	15.932,4	16.751,4	17.4495,7
Kalimantan	13.850,9	15.343,0	16.769,7	18.082,6	19.264,8	20.318,1
Sulawesi	17.437,1	18.724,0	19.934,0	21.019,8	21.953,5	22.732,0
Kep. Maluku	2.585,2	2.848,8	3.110,7	3.363,7	3.603,6	3.831,4
Papua	3.622,3	4.020,9	4.417,2	4.793,9	5.139,5	5.449,5
Indonesia	238.518,8	255.461,7	271.066,4	284.829,0	296.405,1	305.625,4

*Sumber Data: Data Pusat Statistik*



Faktor tenaga kerja merupakan bagian dari sumber daya manusia (SDM) dalam era pembangunan nasional, termasuk faktor krusial sebagai barometer keberhasilan pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat tinggi, hal ini bisa menjadi kendala apabila pemerintah tidak dapat mengelola potensi tersebut (Abidin, 2021).

Masalah ketenagakerjaan perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan. Sempitnya lapangan kerja yang tersedia akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Memasuki zaman teknologi, para tenaga kerja yang berpendidikan SMA hingga perguruan tinggi jarang tertarik untuk bekerja pada bidang pertanian dan memilih untuk bekerja pada sektor lainnya sehingga sektor pertanian selalu didominasi oleh pekerja yang tingkat pendidikannya rendah yang mengakibatkan sektor pertanian selalu dipandang sebelah mata (Kusumaningrum, 2019).

Peningkatan pengangguran akan terus meningkat tentunya menambah beban perekonomian daerah dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Padahal sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan tidak memerlukan keahlian khusus seperti sektor lainnya. Hal ini sekaligus bisa menjadi solusi terhadap pengangguran kemiskinan bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan atau keterampilan terbatas. Namun seiring berjalannya waktu, sektor pertanian di Indonesia mulai terabaikan dan digantikan oleh sektor industri. Terpuruknya sektor pertanian disebabkan oleh belum adanya regulasi yang berpihak pada sektor pertanian serta masih rendahnya tingkat investasi pada sektor pertanian (Yudistira Dama et al., 2016).

Hal ini menghambat inovasi dan peningkatan output di sektor pertanian. Dengan demikian, pertumbuhan sektor pertanian mulai melambat. Berangkat dari pemikiran-pemikiran tersebut, maka penulis mengambil judul skripsi: ***"Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Nilai Tukar Petani, dan Investasi Sektor Pertanian Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Provinsi Jawa Barat"***.

## **B. Perumusan masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat teridentifikasi sebagai berikut:

1. Peningkatan pengangguran akan terus meningkat tentunya menambah beban perekonomian daerah dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Padahal sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan tidak memerlukan keahlian khusus.
2. Namun seiring berjalannya waktu, sektor pertanian di Jawa Barat mulai terabaikan dan digantikan oleh sektor industri yang membuat pertumbuhan sektor pertanian melambat.
3. Sumbangisasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor pertanian sangatlah tinggi, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Barat dapat terlihat tingkat daya saing produk pertanian yang dihasilkan petani dibandingkan dengan produk lain dan Investasi Sektor Pertanian mengalami kemajuan dengan bertambahnya angka investasi dari tahun ke tahun. Namun, belum bisa menyerap tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat untuk pengentasan masalah kemiskinan dan pengangguran.

### **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang cukup luas seperti yang telah diuraikan, maka perlu adanya pembatas masalah yang akan diteliti. Maka, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini dengan variabel bebas yang akan diukur terdiri dari tiga variabel, yaitu Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian ( $X_1$ ), Nilai Tukar Petani ( $X_2$ ) dan Investasi Sektor Pertanian ( $X_3$ ), sedangkan variabel terikatnya yaitu Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat ( $Y$ ).

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka permasalahan yang muncul yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh Nilai Tukar Petani terhadap Tenaga Kerja Sektor Pertanian Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh Investasi Sektor Pertanian Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Nilai Tukar Petani, dan Investasi Sektor Pertanian secara Simultan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Provinsi Jawa Barat?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian dalam menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Investasi sektor pertanian terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sektor pertanian di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Umum

Mengkaji apakah ada pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Nilai Tukar Petani, dan Investasi Sektor Pertanian Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Provinsi Jawa Barat.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja Sektor pertanian Provinsi Jawa Barat
- b. Untuk mengetahui pengaruh Nilai Tukar Petani terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian Provinsi Jawa Barat.

- c. Untuk mengetahui pengaruh Investasi Sektor Pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian Provinsi Jawa Barat.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Nilai Tukar Petani, dan Investasi Sektor Pertanian secara Simultan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Provinsi Jawa Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memperoleh pengetahuan mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Nilai Tukar Petani, dan Investasi Sektor Pertanian Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Provinsi Jawa Barat.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Diharapkan dapat digunakan sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas intelektual dalam pengembangan ilmu yang didapat.

- b) Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan melaksanakan pembangunan pertanian dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian Provinsi Jawa Barat.

- c) Bagi Peneliti Lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan, agar hasil penelitian mereka menjadi lebih baik lagi.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari : Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, dan Bab V berisi Kesimpulan dan Saran.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang dari studi ini yang selanjutnya dirumuskan permasalahan penelitian yang berupa pertanyaan kajian. Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bagian terakhir dalam bab ini akan dijabarkan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan landasan teori terkait dengan variabel penelitian, peneliti terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai variabel – variabel yang dipakai dalam penelitian serta definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi pemaparan terhadap gambaran umum dan hasil penelitian yang diuraikan berdasarkan teknik analisis data yang dipakai.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan, serta saran.